

LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
(PERUMDA) PANCA KARYA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2024
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
PERNYATAAN MANAJEMEN	ii
LAPORAN KEUANGAN	
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)	1
Laporan Laba Rugi	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
Catatan Atas Laporan Keuangan	6
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	iii
LAMPIRAN	
Analisa Rasio Keuangan	



SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2024
PERUMDA PANCA KARYA
Nomor: 125/PK-DR/III/2025

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rusdi Ambon, SE., M.Si
Alamat : Jl. Dr. Setia Budi No. 5 Ambon
Telepon : 0853-4370-5315
Jabatan : Direktur Utama

Untuk dan atas nama **Perumda Panca Karya** menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan Keuangan Perumda Panca Karya Tahun 2024.
2. Laporan Keuangan **Perumda Panca Karya** Tahun 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Tahun 2024 **Perumda Panca Karya** telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan **Perumda Panca Karya** Tahun 2024 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh **Perumda Panca Karya** sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi yang relevan bagi **Perumda Panca Karya**.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Ambon, 14 Maret 2025

SIGN I



RUSDI AMBON, SE., M.Si
Direktur Utama



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024

(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



Uraian	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Bank	2.g 3.a	75.711.734	145.984.326
Piutang Usaha	2.h 3.b	216.340.125	-
Piutang Lain-lain	3.c	1.496.163.983	2.195.625.052
Persediaan	2.i	-	-
Uang Muka	2.j 3.d	256.872.157	346.786.882
Total Aset Lancar		2.045.087.999	2.688.396.260
ASET TIDAK LANCAR			
Investasi Pada Entitas Asosiasi	3.e	155.094.000	155.094.000
Aset Tetap Bersih	2.k 3.f	35.314.569.390	36.358.657.852
Total Aset Tidak Lancar		35.469.663.390	36.513.751.852
ASET LAIN - LAIN	3.h	10.644.878.131	10.942.453.131
TOTAL ASET		48.159.629.520	50.144.601.243

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



Uraian	Catatan	2024	2023
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Usaha	3.i	7.761.452.500	8.829.509.138
Utang Pajak	3.j	155.818.193	149.333.168
Beban Yang Masih Harus Dibayar	3.k	9.762.027.259	7.891.068.688
Pendapatan diterima dimuka	3.l	200.000.000	950.000.000
Total Kewajiban Jangka Pendek		17.879.297.952	17.819.910.994
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Bank	3.m	583.333.333	1.583.333.333
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	3.n	1.994.367.678	1.361.399.050
Total Kewajiban Jangka Panjang		2.577.701.011	2.944.732.383
EKUITAS			
Modal Dasar	3.o	37.576.778.804	37.576.778.804
Penambahan Modal		3.000.000.000	3.000.000.000
Dividen / Pendapatan Asli Daerah (PAD)		(0)	(544.027.767)
Laba Ditahan	3.p	(11.196.820.938)	3.830.665.081
Laba Periode Ini		(1.677.327.310)	(14.483.458.252)
Total Ekuitas		27.702.630.556	29.379.957.865
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS		48.159.629.520	50.144.601.243

Ambon, 10 Maret 2025


Rusli Ambon, SE. M.Si
Direktur Utama


Rosnani, S.Hut
Manajer Keuangan

SIGN

*Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan*



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
LAPORAN LABA RUGI
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



Uralan	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN			
PENDAPATAN USAHA	3.q		
Penjualan Kayu		4.401.446.625	2.724.979.050
• Jasa Bengkel		-	-
Jasa Pelayaran		38.893.981.709	37.573.658.471
Trans Ambonia		678.611.841	646.141.261
Jasa Tangki Air		146.000.000	105.600.000
Sewa Gedung		90.000.000	65.000.000
Total Pendapatan Usaha		44.210.040.175	41.115.378.782
BEBAN OPERASI LANGSUNG	3.r		
Divisi Perkayuan		939.883.558	1.254.638.179
Divisi Bengkel		-	-
Divisi Pelayaran		32.373.978.494	42.557.650.606
Divisi Trans Amboina		1.185.014.149	1.195.710.996
Divisi Tangki Air		151.810.000	52.403.000
Divisi Pengelolaan Gedung		123.186.955	195.655.766
Total Beban Operasi Langsung		34.773.873.156	45.256.058.547
LABA KOTOR		9.436.167.019	(4.140.679.765)
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI	3.s		
Beban Pegawai		7.509.776.405	7.152.489.084
Beban Umum Kantor		836.255.561	1.078.597.007
Beban Tatakelola Manajemen		2.981.996.639	2.473.311.897
Beban Hukum		153.293.000	64.500.000
Total Beban Umum Dan Administrasi		11.481.321.605	10.768.897.988
LABA (RUGI) OPERASI		(2.045.154.586)	(14.909.577.753)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN	3.t		
Pendapatan lain - lain		510.465.521	683.564.685
Beban lain - lain		142.638.245	257.445.184
Total Pendapatan (Beban) lain-lain		367.827.276	426.119.501
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(1.677.327.310)	(14.483.458.252)
PPH BADAN	3.u		
Pajak Kini		(1.677.327.310)	(14.483.458.252)
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK			

Ambon, 10 Maret 2025


Rusli Ambon, SE. M.Si
Direktur Utama


Rosnani, S.Hut
Manajer Keuangan

SIGI

Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



Uraian	Modal	Penambahan Modal Penyertaan	Saldo Laba (Rugi)	Total Ekuitas
Saldo 31 Desember 2022	37.576.778.804	1.500.000.000	3.830.665.081	42.907.443.885
Penyertaan Modal	-	1.500.000.000	-	1.500.000.000
PAD ke Pemprov Maluku	-	-	(544.027.767)	(544.027.767)
Koreksi Rugi Tahun Lalu	-	-	-	-
Laba Tahun Berjalan	-	-	(14.483.458.252)	(14.483.458.252)
Saldo 31 Desember 2023	37.576.778.804	3.000.000.000	(11.196.820.939)	29.379.957.865
Penyertaan Modal	-	-	-	-
PAD ke Pemprov Maluku	-	-	-	-
Koreksi Rugi Tahun Lalu	-	-	-	-
Laba Tahun Berjalan	-	-	(1.677.327.310)	(1.677.327.310)
Saldo 31 Desember 2024	37.576.778.804	3.000.000.000	(12.874.148.248)	27.702.630.556

*Catatan atas laporan keuangan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan*

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA****LAPORAN ARUS KAS****Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024****(Dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)**

Uraian	2024	2023
ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI		
Laba Tahun Berjalan	(1.677.327.310)	(14.483.458.252)
Penyesuaian untuk :		
Beban Penyusutan Aset Tetap	1.072.638.462	622.092.096
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	-	-
Koreksi Saldo Rugi Tahun Lalu	-	-
Perubahan Modal Kerja		
Piutang Usaha	(216.340.125)	1.108.841.980
Piutang Lain-lain	699.461.069	(300.072.089)
Persediaan	-	-
Pembayaran di Muka	89.914.725	1.601.723.753
Aset Lain-lain	297.575.000	372.575.000
Hutang Usaha	(1.068.056.638)	2.848.143.416
Utang Pajak	6.485.025	(430.602.723)
Beban yang masih harus dibayar	1.870.958.571	997.859.367
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	(750.000.000)	750.000.000
Pendapatan diterima dimuka	632.968.628	(119.216.818)
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	(1.000.000.000)	1.583.333.333
Hutang Bank	1.635.604.717	9.034.677.316
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI		
Hak Penguasaan Hutan	-	(4.000.000)
Investasi	(28.550.000)	-
Perolehan Aset Tetap	(28.550.000)	(4.000.000)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN		
Penyertaan Modal	-	1.500.000.000
Penyertaan Modal Yg Belum Ditetapkan Statusnya	-	(544.027.767)
PAD ke Pemprov Maluku	-	955.972.233
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	(70.272.593)	(4.496.808.704)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	145.984.326	4.642.793.030
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	75.711.733	145.984.326

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



1. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Kebijakan ini telah diaplikasikan secara konsisten terhadap tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Perusahaan menerapkan SAK-ETAP sebagai basis penyusunan laporan keuangan dan penentuan kebijakan akuntansi penting yang diterapkan untuk mengakui dan mengukur transaksi dan peristiwa yang relevan dengan Perusahaan.

Laporan keuangan Perusahaan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Perusahaan menyajikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas secara tersendiri.

Laporan keuangan disusun berdasarkan basis kesinambungan usaha dan biaya historis. Laporan keuangan juga disusun berdasarkan basis akrual, kecuali laporan arus kas yang disusun berdasarkan basis kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung.

b. Mata Uang Pelaporan, Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs tunai (*spot rate*) pada saat terjadinya transaksi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengakuan sesuai dengan SAK ETAP.

Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan sisa hasil usaha tahun berjalan.

c. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Suatu pihak mempunyai hubungan istimewa dengan entitas jika:

- i. Secara langsung, atau tidak langsung melalui satu atau lebih perantara, pihak tersebut:
 - a. Mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan, entitas (termasuk entitas induk, entitas anak, dan *fellow subsidiaries*);
 - b. Memiliki kepemilikan di entitas yang memberikan pengaruh signifikan atas entitas; atau
 - c. Memiliki pengendalian bersama atas entitas;
- ii. Pihak tersebut adalah entitas asosiasi dari entitas;
- iii. Pihak tersebut adalah *joint ventures* dimana entitas tersebut merupakan *venture*;
- iv. Pihak tersebut adalah personil manajemen kunci entitas atau entitas induknya;
- v. Pihak tersebut adalah keluarga dekat dan setiap orang yang diuraikan dalam (i) atau (iv);



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

c. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa (Lanjutan)

- vi. Pihak tersebut adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau memiliki hak suara secara signifikan secara langsung atau tidak langsung, setiap orang yang diuraikan dalam (iv) & (v)
- vii. Pihak tersebut adalah program imbalan pasca kerja untuk imbalan pekerja entitas, atau setiap entitas yang mempunyai hubungan istimewa dengan entitas tersebut.

Perusahaan menetapkan bahwa personil manajemen kunci meliputi Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Sedangkan anggota keluarga dekat meliputi suami, istri, anak atau tanggungnya.

Perusahaan mengungkapkan saldo dan transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu jenis dan jumlah transaksi, saldo termasuk syarat dan kondisi serta sifat pembayaran dan rincian jaminan yang diberikan atau diterima, penyisihan kerugian piutang tak tertagih terkait jumlah saldo piutang, dan beban yang diakui dalam periode yang berkaitan dengan piutang ragu-ragu yang jatuh tempo dari pihak hubungan istimewa. Hubungan entitas anak dan induk diungkapkan baik ada atau tidak terdapat transaksi antar pihak hubungan istimewa. Kompensasi personil manajemen kunci diungkapkan secara total.

d. Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka entitas mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (*imputed interest rate*).

Pendapatan terdiri dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan diakui sebagai:

i. Penjualan barang

Penjualan barang diakui ketika semua kondisi berikut telah terpenuhi, yaitu:

- a) Risiko dan manfaat signifikan terkait dengan barang tersebut telah dialihkan kepada pembeli;
- b) Perusahaan tidak mempertahankan atau meneruskan keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun *control* efektif atas barang yang terjual;
- c) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
- d) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan, dan
- e) Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal.

ii. Penjualan jasa

Penjualan jasa diakui dengan metode penyelesaian dalam periode akuntansi ketika semua kondisi berikut terpenuhi:

- a) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
- b) Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke Perusahaan;
- c) Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal; dan
- d) Biaya yang telah terjadi atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi

Beban diakui pada saat terjadinya (*basis akrual*).

e. Imbalan Kerja

Perusahaan mengakui kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam SAK ETAP Bab 23 "Imbalan Kerja" dan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Imbalan Kerja (Lanjutan)

Dalam ketentuan tersebut Perseroan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan pascakerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti. Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terjadinya.

f. Pajak Penghasilan

Perusahaan mengakui kewajiban atas seluruh pajak penghasilan periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar. Jika Jumlah yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi Jumlah yang terutang untuk periode tersebut, Perusahaan harus mengakui kelebihan tersebut sebagai aset. Perusahaan tidak mengakui pajak tangguhan.

g. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Aset yang dibatasi penggunaannya" yang kategorikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo yaitu pada saat selesai pembatasan penggunaannya.

h. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penurunan nilai yang dibentuk sebesar estimasi penyisihan Piutang tak tertagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek usaha dan industri, Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Piutang usaha disajikan menurut piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan piutang pihak ketiga.

i. Persediaan

Persediaan disajikan dengan nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan harga jual dikurangi biaya untuk menjual. Pembebanan atas pemakaian persediaan dicatat dengan menggunakan metode *First In First Out (FIFO)*. Metode pencatatan persediaan sebagai berikut :

- Persediaan bahan instalasi menggunakan *Perpetual Inventory Method*;
- Persediaan bahan kimia dan operasi lainnya yang sifatnya merupakan barang habis pakai, menggunakan *Physical Inventory Method*.

Pada setiap tanggal pelaporan terhadap persediaan dilakukan penilaian kemungkinan terjadinya penurunan nilai persediaan, misalnya karena rusak atau usang. Persediaan yang menurun nilainya diukur pada harga jual dikurangi beban untuk menjual, serta mengakui kerugian penurunan nilai dalam pos "kerugian penurunan nilai persediaan".

j. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Aset Tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan serta estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset dan biaya restorasi relokasi.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

k. Aset Tetap (Lanjutan)

Pajak-pajak yang dapat kreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan dan berhenti ketika aset tetap dihapuskan. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan perhitungan hasil usaha, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK ETAP.

Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah saldo menurun untuk aset tetap bukan bangunan dan garis lurus untuk aset tetap bangunan, dengan persentase penyusutan per tahun sebagai berikut :

No	Uraian Kelompok	Masa Manfaat	Metode Tarif Penyusutan	
			Garis Lurus	Saldo Menurun
I.	Bukan Bangunan			
a.	Kelompok I	4	25%	50%
b.	Kelompok II	8	12,50%	25%
c.	Kelompok III	16	6,25%	12,50%
d.	Kelompok IV	20	5%	10%
II.	Bangunan			
a.	Permanen	20	5%	
b.	Tidak Permanen	10	10%	

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan, dan laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

l. Sewa

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan aset. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

m. Kelangsungan Hidup Perusahaan (*Going Concern*)

Laporan Keuangan ini disusun dengan anggapan Perumda Panca Karya akan melanjutkan usahanya secara berkesinambungan (*going concern*).

Tidak terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan Perumda Panca Karya untuk melanjutkan usaha.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

a. Kas dan Setara Kas

1) Kas

	2024	2023
Kas Umum	4.685.881	7.258.500
Kas Bon Sementara	-	-
Kas Kecil	-	-
Sub total Kas Tunal	4.685.881	7.258.500

2) Bank

	2024	2023
Bank Mandiri 152-000021120-7	2.109.042	1.272.121
Bank BRI 00000001-01-000706-30-5	50.926.368	96.970.560
Bank BNI 0085685177	4.019.677	1.019.677
Bank BNI 2323111144	654.779	20.589.137
Bank MUAMALAT	7.035.916	7.375.916
Bank MALUKU 1101009684	1.429.610	6.287.954
Bank Artha Graha	4.850.461	5.210.461
Sub total Bank	71.025.853	138.725.826
Total Kas dan Setara Kas	75.711.734	145.984.326

b. Piutang Usaha

	2024	2023
Piutang Pendapatan Pelayaran	173.762.700	-
Piutang Dagang Kayu	42.577.425	-
Total Piutang Usaha	216.340.125	-

Perusahaan belum menetapkan kebijakan dan memperhitungkan penyisihan piutang usaha terhadap resiko piutang usaha tidak tertagih.

c. Piutang Lain-lain - bersih

	2024	2023
Piutang Karyawan	1.031.984.758	1.130.580.452
Cadangan Penyisihan Piutang Karyawan	(43.850.000)	(43.850.000)
Piutang Deviden PT. Gema Hutan Lestari	508.029.225	1.108.894.600
Piutang Lain-lain yang tak tertagih	1.886.854.479	1.886.854.479
Cadangan Penyisihan Piutang Lain-lain	(1.886.854.479)	(1.886.854.479)
Total Piutang Lain-Lain	1.496.163.983	2.195.625.052

Pembentukan cadangan penyisihan piutang karyawan merupakan piutang karyawan sudah tidak ditagih. Pada tahun 2023, dilakukan cadangan penyisihan piutang karyawan dengan rincian sebagai berikut :

	2023
Ex Pegawai	6.750.000
J. Komaling	4.100.000
Joseph Patty	33.000.000
Total	43.850.000

Pada tahun 2024, dilakukan cadangan penyisihan piutang karyawan dengan nominal yang sama seperti tahun 2023. Hal ini disebabkan karena perusahaan belum menetapkan kebijakan dan memperhitungkan cadangan penyisihan piutang karyawan untuk tahun 2024.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

d. Uang Muka

	2024	2023
Biaya Dibayar Di Muka	484.657	74.484.657
Uang Muka Direksi	-	15.914.725
Uang Muka Operasional KMP. Lelemuku	256.387.500	256.387.500
Total Biaya Dibayar Dimuka	256.872.157	346.786.882

Pembayaran Dimuka merupakan pemberian uang kerja dilingkungan Perumda Panca Karya untuk operasional perusahaan, akan tetapi pemberian uang muka tersebut belum dibuatkan kebijakan/pedoman tatakelola dan batas waktu atas pertanggung jawaban uang muka tersebut.

f. Investasi Pada Entitas Asosiasi

	2024	2023
Investasi PT. Karya Maluku Konstruksi	331.751.450	331.751.450
Investasi dalam Coldstorage	234.005.200	234.005.200
Investasi dalam Sawmill	191.362.000	191.362.000
Investasi PT. Sarana Maluku Ventura	129.994.000	129.994.000
Investasi PT. Maluku Energi Abadi	25.100.000	25.100.000
Penurunan Nilai Investasi	(757.118.650)	(757.118.650)
Total Investasi Pada Entitas Asosiasi	155.094.000	155.094.000

Penambahan Investasi tahun 2021 berdasarkan kepada Peraturan Daerah Maluku Nomor 7 Tahun 2020 tertanggal 18 November 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi Bab. V Besarnya Modal Dasar pasal 6 ayat 2 menyatakan :

Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas komposisi sebagai berikut :

- Pemerintah Provinsi Maluku paling sedikit 99,9% atau sebesar Rp24.975.000.000,- (*Dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*)
- Perusahaan Umum Daerah Panca Karya paling banyak 0,1% atau sebesar Rp25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*)

g. Aset Tetap Bersih

Nilai Perolehan	Saldo Awal 01 Jan. 2024	Mutasi selama tahun 2024			Saldo akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi / Koreksi	
Tanah	24.626.793.580	-	-	-	24.626.793.580
Bangunan	11.615.772.760	-	-	-	11.615.772.760
Pabrik Sawmill	224.898.000	-	-	-	224.898.000
Kapal Laut	495.467.210	-	-	-	495.467.210
Kendaraan	2.560.570.072	-	-	-	2.560.570.072
Peralatan	776.257.375	-	-	-	776.257.375
Inventaris Kantor	3.133.898.510	28.550.000	-	-	3.162.448.510
Total Nilai Perolehan	43.433.657.507	28.550.000	-	-	43.462.207.507

Akumulasi Penyusutan	Saldo Awal 01 Jan. 2024	Mutasi selama tahun 2024			Saldo akhir 31 Desember 2024
		Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi / Koreksi	
Bangunan	1.369.762.972	558.572.766	-	-	1.928.335.738
Pabrik Sawmill	176.994.851	11.244.900	-	-	188.239.751
Kapal Laut	495.467.208	-	-	-	495.467.208
Kendaraan	2.405.076.324	19.389.998	-	-	2.424.466.322
Peralatan	776.257.376	-	-	-	776.257.376
Inventaris Kantor	1.851.440.924	483.430.797	-	-	2.334.871.721
Total Ak. Penyusutan	7.074.999.655	1.072.638.461	-	-	8.147.638.116

Nilai Buku 2024 **36.358.657.852**

35.314.569.391



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

g. Aset Tetap Bersih (Lanjutan)

Nilai Perolehan	Saldo Awal 01 Jan. 2023	Mutasi selama tahun 2023			Saldo akhir 31 Desember 2023
		Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi / Koreksi	
Tanah	24.626.793.580	-	-	-	24.626.793.580
Bangunan	11.615.772.760	-	-	-	11.615.772.760
Pabrik Sawmill	224.898.000	-	-	-	224.898.000
Kapal Laut	495.467.210	-	-	-	495.467.210
Kendaraan	2.560.570.072	-	-	-	2.560.570.072
Peralatan	776.257.375	-	-	-	776.257.375
Investasi Kantor	3.129.898.510	4.000.000	-	-	3.133.898.510
Total Nilai Perolehan	43.429.657.507	4.000.000	-	-	43.433.657.507

Akumulasi Penyusutan	Saldo Awal 01 Jan. 2023	Mutasi selama tahun 2023			Saldo akhir 31 Desember 2023
		Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi / Koreksi	
Bangunan	1.331.338.499	38.424.473	-	-	1.369.762.972
Pabrik Sawmill	165.749.951	11.244.900	-	-	176.994.851
Kapal Laut	495.467.208	-	-	-	495.467.208
Kendaraan	2.313.191.324	91.885.000	-	-	2.405.076.324
Peralatan	776.257.376	-	-	-	776.257.376
Investasi Kantor	1.370.903.201	480.537.723	-	-	1.851.440.924
Total Ak. Penyusutan	6.452.907.559	622.092.096	-	-	7.074.999.655

Nilai Buku 2023

36.976.749.948

36.358.657.852

Pada tahun 2024 terdapat penambahan aset tetap Perumda Panca Karya sebesar Rp28.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Inventaris Kantor

28.550.000

Total Penambahan Selama Tahun 2024

28.550.000

h. Aset Lain-lain

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Hak Pengusahaan Hutan	8.927.250.000	8.927.250.000
Amortisasi HPH	(2.058.227.083)	(1.760.652.083)
Sewa dibayar dimuka	150.000.000	150.000.000
Amortisasi Sewa	(118.750.000)	(118.750.000)
Kasbon	1.323.042.710	1.323.042.710
Uang Muka Biaya	2.421.562.504	2.421.562.504
Total Aset Lain-lain	<u>10.644.878.131</u>	<u>10.942.453.131</u>

Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 117/Kpts-II/2000 tentang Pembaharuan Hak Penguasaan Hutan Alam PD Panca Karya seluas ± 63.440 (Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh) Hektar di Provinsi Maluku.

Sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 14/I/IUPHHK-HA/PMDH/2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PD Panca Karya Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 59.515 Hektar di Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Buru Provinsi Maluku tertanggal 12 September 2017, hurup D pont d.3 menyatakan :

Telah membayar iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) untuk jangka waktu 30 Tahun sebesar Rp8.927.250.000,- melalui Sistem Informasi PNBP online (SIMPON) sebagai pemenuhan atas Surat Perintah Pembayaran iuran Izin Usaha Pemanfaatan (SPP-IUPH) Nomor : S.680/PHPL/IPHH/HPL.4/9/2-2016 tanggal 22 September 2016.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
 (Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

h. Aset Lain-lain (Lanjutan)

Terdapat saldo Kasbon dan Uang Muka yang sudah cukup lama dan belum dipertanggungjawabkan oleh pemegang kasbon dan uang muka masing-masing yang berasal dari tahun 2018 senilai Rp1.323.042.710 dan Rp2.421.562.504

i. Utang Usaha

	2024	2023
PT. Sumber Karya Anugerah	775.638.000	886.966.000
PT. Jasa Raharja Putera Insurance	3.014.662.576	2.278.758.278
PT. Tanjung Alam Sentosa	467.003.465	467.003.465
PT. Jasindo Insurance	530.946.162	530.946.162
PT. Dok Perkapalan Waiame	1.967.281.912	2.841.076.848
CV. Alam Indah Permal	460.023.073	460.023.073
PT. Biro Klasifikasi Indonesia	-	-
PT. Jasa Raharja Putera (Recovery Claim)	545.897.312	1.364.735.312
Total Utang Usaha	7.761.452.500	8.829.509.138

j. Utang Pajak

	2024	2023
Hutang PPH pasal 29 Tahun 2017	-	31.983.233
Hutang Pajak PPh 25/29	-	70
Hutang PBB HPH (SKP thn 2003)	100.000.000	100.000.000
PPH Pasal 21 Pegawai	55.818.193	17.349.865
Total Utang Pajak	155.818.193	149.333.168

k. Beban Yang Masih Harus Dibayar

	2024	2023
Titipan Mitra	122.634.905	122.634.905
Pengurusan Dokumen	28.535.000	28.535.000
BYMHD Pelayaran	85.475.500	-
Titipan MR. Sarana Jaya	50.000.000	50.000.000
BYMHD Gaji	1.902.968.623	1.156.350.728
BYMHD Penyusunan Laporan Keuangan	2.900.000	2.900.000
BYMHD Gaji Pegawai 2018	1.224.332.756	1.229.063.636
BYMHD Gaji Tahun 2020	1.984.024.129	2.367.438.301
Pengembalian Dana Subsidi KMP. Bahtera Nusantara 02	1.143.090.075	1.143.090.075
BYMHD Iuran BPJS Ketenagakerjaan	2.662.599.780	1.397.028.277
Hutang PAD ke Pemprov	394.027.766	394.027.766
BYMHD Pesangon	161.438.725	-
Total Beban Yang Masih Harus Dibayar	9.762.027.259	7.891.068.688

Hutang PAD ke Pemrov. Maluku merupakan hasil perhitungan PAD yang harus disetorkan Perumda Panca Karya per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Tunggakan PAD atas laba Tahun 2014	1.202.394.958	1.202.394.958
- Tunggakan PAD atas laba Tahun 2017	100.095.839	100.095.839
- Tunggakan PAD atas laba Tahun 2019	285.888.746	285.888.746
- Tunggakan PAD atas laba Tahun 2020	1.414.231.257	1.414.231.257
- Tunggakan PAD atas laba Tahun 2022	544.027.767	544.027.767
Total Tunggakan PAD ke Pemrov. Maluku	3.546.638.567	3.546.638.567
- Setoran PAD ke Pemprov. Tahun 2020	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
- Setoran PAD ke Pemprov. Tahun 2021	(400.000.000)	(400.000.000)
- Setoran PAD ke Pemprov. Tahun 2022	(188.379.543)	(188.379.543)
- Setoran PAD ke Pemprov. Tahun 2023	(1.564.231.258)	(1.564.231.258)
Saldo kewajiban ke Pemprov. Maluku	394.027.766	394.027.766



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

l. Pendapatan Diterima Dimuka

	2024	2023
Bagi Hasil Penjualan Kayu dengan PT. TAS	200.000.000	200.000.000
Pend. Diterima Dimuka Penj. kayu dengan PT. PAS	-	750.000.000
Total Pendapatan Diterima Dimuka	200.000.000	950.000.000

Pendapatan Diterima Dimuka Penjualan kayu merupakan kerjasama antara PT. Persada Anugrah Selaras (PT. PAS) dengan PD. Panca Karya SPK Nomor : 212/PK-PAS/PHPL/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016 perihal pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Perjanjian tambahan (Addendum) atas perjanjian kerjasama operasional pengelolaan hutan produksi lestari tertanggal 01 November 2018, point II menyatakan : "Merubah ketentuan pasal 3 ayat (1.b) Perjanjian sehingga secara keseluruhan ketentuan pasal 3 ayat (1.b) menjadi PIHAK PERTAMA telah menerima down payment sebesar Rp12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar) untuk keperluan pengurusan perpanjangan periode ke II terutama terkait dengan pembayaran iuran izin UPHHK-HA yang akan dipotong/diperhitungkan dengan pembagian hasil kerjasama (ayat 1.a) Pasal ini sebesar Rp65.000,-/M3 (Enam Puluh Lima Ribu Rupiah per meter kubik).

Realisasi amortisasi pendapatan diterima dimuka diakui sebagai pendapatan sampai dengan periode tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	2024	2023
Saldo Awal Pend. Diterima dimuka	950.000.000	200.000.000
Pengakuan Pend. Pada Tahun Berjalan	-	-
Pend. Diterima dimuka dari PT. PAS	(750.000.000)	750.000.000
Saldo Akhir Pend. Diterima dimuka	200.000.000	950.000.000

m. Utang Bank

	2024	2023
Utang Bank	583.333.333	1.583.333.333
Total Utang Bank	583.333.333	1.583.333.333

Utang Bank merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara cabang Batu Merah kepada Perumda Panca Karya dengan perjanjian kredit Nomor : BTM/PK/KMK/001/IX/2023 dengan perincian sebagai berikut :

- Maksimum Kredit : Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)
- Jenis Kredit : KMK-Umum
- Keperluan : Tambahan modal kerja untuk pembayaran pembiayaan maintenance 1 Unit Kapal Ferry Komersil.
- Jangka Waktu : 24 bulan/2 Tahun
- Bentuk/Sifat : Aflopend
- Bunga : 12% Per tahun efektif
- Provisi : 1,5% dari maksimum kredit
- Asuransi : Askrindo
- Jaminan Pokok :
 - 1) Usaha yang dibiayai dengan dana bank
 - 2) SHGB No.89 luas 890 m2 & SHGB No.90 luas 324 m2 atas nama PD. Panca Karya.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

n. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja

	2024	2023
Saldo Awal		
Penambahan	1.361.399.050	1.480.615.868
Kewajiban Penghargaan Pegawai	632.968.628	-
Total Saldo Laba/Rugi		(119.216.818)
	<u>1.994.367.678</u>	<u>1.361.399.050</u>

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja Perumda Panca Karya dihitung sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja serta Undang-Undang Cipta Kerja.

o. Modal

	2024	2023
Penyertaan Provinsi Maluku	37.576.778.804	37.576.778.804
Penambahan Selama Tahun 2023	1.500.000.000	1.500.000.000
Penambahan Selama Tahun 2024	1.500.000.000	1.500.000.000
Total Modal	<u>40.576.778.804</u>	<u>40.576.778.804</u>

Sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Tingkat 1 Provinsi Maluku Nomor : 04 Tahun 2012, tanggal 20 Juni 2012 pada Bab VI Pasal 7 Ayat (1) modal dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp 29.078.263.128,- yang seluruhnya terdiri dari kekayaan daerah.

Sebagaimana diubah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Panca Karya Bab. V Modal Bagian kesatu Sumber Modal Pasal 8 ayat 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Modal dasar Perumda Panca Karya ditetapkan sebesar Rp37.576.778.804 (Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah)
- (2) Modal yang telah disetor pada Perumda sebesar Rp25.576.778.804 (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Juta Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah)

Dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Panca Karya Bab II Jenis dan Besaran Penyertaan Modal pasal 6 dan 7 menyatakan :

Pasal 6 : Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp25.576.778.804,- (Dua Puluh Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah).

Pasal 7 : (1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal berupa pembangunan Gedung Kantor Perumda Panca Karya sebesar Rp12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) Pada Tahun Anggaran 2020.

- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daerah.

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada Perumda Panca Karya sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah).

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Panca Karya tertanggal 23 Desember 2022 Bab. II Besaran Penyertaan Modal Pasal 5 point (1) menyatakan "Penambahan penyertaan modal daerah kepada Perumda sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).

p. Laba /(Rugi) Ditahan

	2024	2023
Laba/(Rugi) Ditahan	(11.196.820.938)	3.830.665.081
Total Saldo Laba/(Rugi) Ditahan	<u>(11.196.820.938)</u>	<u>3.830.665.081</u>



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

q. Pendapatan

1) Pendapatan

Bagi Hasil Penjualan Kayu

Pendapatan Sawmill

Total Penjualan Kayu

2024	2023
4.401.446.625	2.724.979.050
4.401.446.625	2.724.979.050

- Amortisasi Pend Diterima Dimuka

- Bagi Hasil Penjualan kayu

Total Pendapatan Kayu

2024	2023
4.401.446.625	2.724.979.050
4.401.446.625	2.724.979.050

2) Jasa Bengkel

Jasa Bengkel

Total Pendapatan Jasa Bengkel

2024	2023
-	-
-	-

3) Jasa Pelayaran

Pendapatan KMP. Teluk Ambon

Pendapatan KMP. Tanjung Koako

Pendapatan KMP. Bada Leon

Pendapatan KMP. Tatihu

Pendapatan KMP. Tanjung Sole

Pendapatan KMP. Maluku Indah

Pendapatan KMP. Sardinela

Pendapatan KMP. Bahtera Nusantara 02

Pendapatan KMP. Lorry Amar

Dana Subsidi KMP. Teluk Ambon

Dana Subsidi KMP. Bada Leon

Dana Subsidi KMP. Tatihu

Dana Subsidi KMP. Tanjung Sole

Dana Subsidi KMP. Maluku Indah

Dana Subsidi KMP. Bahtera Nusantara 02

Dana Subsidi KMP. Lorry Amar

Total Pendapatan Jasa Pelayaran

2024	2023
290.934.848	143.498.635
5.156.452.965	6.894.262.540
-	33.562.222
13.019.024.848	4.872.405.938
283.699.888	184.400.080
19.291.400	-
14.012.649.330	9.225.565.196
-	1.195.024.772
-	106.383.651
1.608.452.034	1.735.892.000
954.955.943	2.610.703.997
-	-
1.530.629.000	2.726.000.190
253.090.453	-
752.506.000	5.674.113.250
1.012.295.000	2.171.240.000
38.893.981.709	37.573.658.471

4) Pendapatan Unit Usaha Trans Amboina

Pendapatan BRT Trans Amboina

Dana Subsidi Trans Amboina

Pendapatan Jasa Sewa Trans Amboina

Total Pendapatan Amboina

2024	2023
12.448.250	10.664.500
395.631.691	242.126.761
270.531.900	393.350.000
678.611.841	646.141.261

5) Pendapatan Jasa Tangki

Pendapatan Tangki Air

Total Pendapatan Jasa Tangki

2024	2023
146.000.000	105.600.000
146.000.000	105.600.000



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

q. Pendapatan (Lanjutan)

6) Pendapatan Sewa Gedung

	2024	2023
Pendapatan Sewa Gedung Islamic Center	-	-
Pendapatan Sewa Gedung Christian Center	90.000.000	65.000.000
Total Pendapatan Sewa Gedung	90.000.000	65.000.000
Total Pendapatan	44.210.040.175	41.115.378.782

r. Beban Operasi Langsung

1) Divisi Perakayan

	2024	2023
Amortisasi HPH	297.575.000	297.575.000
Biaya Pengawasan	-	394.829.064
Lain-lain Perakayan	280.841.625	263.780.075
Gaji Pegawai Divisi Perakayan	361.466.933	298.454.040
Beban Penyusutan Sawmill	-	-
TOTAL BEBAN DIVISI PERKAYUAN	939.883.558	1.254.638.179

2) Divisi Bengkel

	2024	2023
Pembelian Sparepart	-	-
Biaya Gaji Divisi Bengkel	-	-
Lain-lain Biaya Bengkel	-	-
Pembelian Peralatan Bengkel	-	-
TOTAL BEBAN DIVISI BENGKEL	-	-

3) Divisi Pelayaran

a) BEBAN UMUM PELAYARAN

	2024	2023
Gaji Pegawai Divisi Pelayaran	303.393.060	257.138.840
Biaya Entertainment Pelayaran	57.421.486	-
lain-lain Biaya Pelayaran	227.078.969	213.981.842
Polis Asuransi Lalunya	91.830.950	87.501.054
Biaya Administrasi Pelayaran	189.677.700	3.667.000
Biaya penggunaan fasilitas pelabuhan	1.669.591.893	1.217.889.941
Iuran Wajib Kapal Laut	5.015.200	30.544.081
TOTAL BEBAN UMUM PELAYARAN	2.544.009.258	1.810.722.758

b) KMP Teluk Ambon

	2024	2023
Pembelian BBM Teluk Ambon	272.709.000	299.209.000
Pembelian Oli Teluk Ambon	68.157.774	30.043.038
Biaya Gaji Personil Teluk Ambon	1.091.444.123	1.122.500.554
Biaya Umum KMP. Teluk Ambon	180.961.649	185.326.830
Biaya Pemeliharaan Kapal Teluk Ambon	139.069.549	108.610.000
Biaya Pengurusan Dokumen Kapal Teluk Ambon	110.916.500	49.222.310
Biaya Asuransi Kapal Teluk Ambon	176.620.000	-
Biaya Docking Teluk Ambon	-	1.096.620.769
Biaya Survey Kelayakan Kapal KMP. Teluk Ambon	228.105.500	38.850.000



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

r. Beban Operasi Langsung (Lanjutan)

3) Divisi Pelayaran (Lanjutan)

b) KMP Teluk Ambon (Lanjutan)

	2024	2023
Biaya Kebutuhan/Perlengkapan KMP. Teluk Ambon	377.826.542	78.164.600
Biaya Jasa Owner Surveyer KMP Teluk Ambon	25.100.000	30.000.000
Biaya Docking Swakelola KMP. Teluk Ambon	-	29.642.950
TOTAL BEBAN KMP TELUK AMBON	2.670.910.637	3.068.190.051

c) KMP Tanjung Koako

	2024	2023
Pembelian BBM KMP. Tanjung Koako	1.295.359.365	1.896.129.500
Pembelian Oli KMP. Tanjung Koako	98.863.926	83.329.032
Biaya Gaji Personil KMP. Tanjung Koako	1.614.615.921	1.499.983.540
Biaya Umum KMP. Tanjung Koako	186.416.500	86.467.940
Biaya Pemeliharaan Kapal KMP. Tanjung Koako	34.069.500	508.027.065
Biaya Pengurusan Dokumen Kapal KMP. Tanjung Koako	8.990.700	4.082.450
Biaya Asuransi Kapal KMP. Tanjung Koako	268.268.800	223.569.000
Biaya Docking KMP. Tanjung Koako	1.523.903.209	692.499.745
Biaya Survey Kelayakan kapal KMP. Tanjung Koako	149.850.000	230.158.500
Biaya Kebutuhan/Perlengkapan KMP. Tanjung Koako	435.915.639	274.958.160
Biaya Jasa Owner Surveyer KMP Tanjung Koako	55.100.000	55.100.000
Biaya Docking swakelola KMP. Tanjung Koako	-	186.916.009
TOTAL BEBAN KMP TANJUNG KOAKO	5.671.353.560	5.741.220.941

d) KMP Bada Leon

	2024	2023
Pembelian BBM KMP. Bada Leon	-	890.123.750
Pembelian Oli KMP. Bada Leon	-	38.672.984
Biaya Gaji Personil KMP. Bada Leon	639.230.000	939.360.000
Biaya Umum KMP. Bada Leon	300.000	101.562.451
Biaya Pemeliharaan Kapal KMP. Bada Leon	206.795.210	163.550.000
Biaya Pengurusan Dokumen Kapal KMP. Bada Leon	-	46.415.822
Biaya Asuransi Kapal KMP. Bada Leon	269.984.690	-
Biaya Docking KMP. Bada Leon	-	685.341.078
Biaya Survey Kelayakan Kapal KMP. Bada Leon	-	56.055.000
Biaya Kebutuhan/perengkapan KMP. Bada Leon	9.280.600	45.137.021
Biaya Jasa Owner Surveyer KMP Bada Leon	70.100.000	-
Biaya Docking swakelola KMP. Bada Leon	-	-
TOTAL BEBAN KMP BADA LEON	1.195.690.500	2.966.218.106

e) KMP Tatihu

	2024	2023
Pembelian BBM KMP. Tatihu	3.948.659.000	1.623.191.915
Pembelian Oli KMP. Tatihu	98.539.806	60.228.822
Biaya Gaji Personil KMP. Tatihu	1.628.684.682	1.220.490.993
Biaya Umum KMP. Tatihu	176.784.083	113.334.335
Biaya Pemeliharaan Kapal KMP. Tatihu	213.752.500	365.085.760
Biaya Pengurusan Dokumen Kapal KMP. Tatihu	86.150.391	53.751.507
Biaya Asuransi Kapal KMP. Tatihu	340.069.996	-
Biaya Docking KMP. Tatihu	809.760.071	1.197.514.948
Biaya Survey Kelayakan Kapal KMP. Tatihu	190.365.000	125.430.000



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

r. Bebag Operasi Langsung (Lanjutan)

3) Divisi Pelayaran (Lanjutan)

e) KMP Tatihu (Lanjutan)

	2024	2023
Biaya Kebutuhan/Perlengkapan KMP. Tatihu	440.589.340	340.919.788
Biaya Jasa Owner Surveyer KMP Tatihu	60.100.000	-
Biaya Docking Swakelola KMP. Tatihu	-	4.000.000
TOTAL BEBAN KMP TATIHU	7.993.454.869	5.103.948.068

f) KMP Tanjung Sole

	2024	2023
Pembelian BBM KMP. Tanjung Sole	580.688.750	858.455.750
Pembelian Oli KMP. Tanjung Sole	-	67.875.390
Biaya Gaji Personil KMP. Tanjung Sole	927.433.637	1.079.284.056
Biaya Umum KMP. Tanjung Sole	21.757.771	105.876.263
Biaya Pemeliharaan Kapal KMP. Tanjung Sole	30.281.000	43.077.000
Biaya Pengurusan Dokumen Kapal KMP. Tanjung Sole	39.814.005	133.744.976
Biaya Asuransi Kapal KMP. Tanjung Sole	273.615.900	-
Biaya Docking KMP. Tanjung Sole	-	605.828.300
Biaya Survey Kelayakan Kapal KMP. Tanjung Sole	183.150.000	122.655.000
Biaya Kebutuhan/perengkapan KMP. Tanjung Sole	134.719.850	69.139.300
Biaya Jasa Owner Surveyer KMP Tanjung Sole	55.100.000	-
Biaya Docking Swakelola KMP. Tanjung Sole	-	-
TOTAL BEBAN KMP TANJUNG SOLE	2.246.560.913	3.085.936.035

g) KMP Maluku Indah

	2024	2023
Pembelian BBM KMP. Maluku Indah	13.640.000	-
Pembelian Oli KMP. Maluku Indah	-	-
Biaya Gaji Personil KMP. Maluku Indah	44.800.000	-
Biaya Umum KMP. Maluku Indah	9.891.102	-
Biaya Pemeliharaan Kapal KMP. Maluku Indah	85.252.500	-
Biaya Pengurusan Dokumen Kapal KMP. Maluku Indah	-	-
Biaya Asuransi Kapal KMP. Maluku Indah	53.631.190	-
Biaya Docking KMP. Maluku Indah	22.500.000	-
Biaya Survey Kelayakan Kapal KMP. Maluku Indah	-	-
Biaya Kebutuhan/Perlengkapan KMP. Maluku Indah	10.320.721	-
Biaya Jasa Owner Surveyer KMP Maluku Indah	-	-
Biaya Docking Swakelola KMP. Maluku Indah	-	-
TOTAL BEBAN KMP MALUKU INDAH	240.035.513	-

h) KMP SARDINELA

	2024	2023
Pembelian BBM KMP. Sardinela	2.386.160.000	2.046.785.000
Pembelian Oli KMP. Sardinela	114.029.190	90.905.115
Biaya Gaji Personil KMP. Sardinela	1.310.508.640	1.216.298.790
Biaya Umum KMP. Sardinela	134.092.498	192.699.975
Biaya Pemeliharaan Kapal KMP. Sardinela	203.157.344	463.888.947
Biaya Pengurusan Dokumen Kapal KMP. Sardinela	5.954.317	5.431.700
Biaya Asuransi Kapal KMP. Sardinela	-	379.614.280
Biaya Docking KMP. Sardinela	666.581.694	980.264.000
Biaya Survey Kelayakan Kapal KMP. Sardinela	-	56.055.000



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

r. Beban Operasi Langsung (Lanjutan)

3) Divisi Pelayaran (Lanjutan)

h) KMP SARDINELA (Lanjutan)

	2024	2023
Biaya Kebutuhan/Perlengkapan KMP. Sardinela	241.959.017	675.492.895
Biaya Jasa Owner Surveyer KMP Sardinela	-	55.100.000
Biaya Docking Swakelola KMP. Sardinela	-	4.000.000
TOTAL BEBAN KMP SARDINELA	5.062.442.700	6.166.035.702

i) KMP BAHTERA NUSANTARA 02

	2024	2023
Pembelian BBM KMP. Bahtera 02	214.229.500	3.058.969.500
Pembelian Oli KMP. Bahtera 02	150.150.000	143.011.395
Biaya Gaji Personil Bahtera 02	1.396.784.200	1.717.249.465
Biaya Umum KMP. Bahtera 02	161.767.650	327.958.034
Biaya Pemeliharaan Kapal Bahtera 02	1.350.578.810	1.164.362.996
Biaya Pengurusan Dokumen Kapal Bahtera 02	1.450.000	111.457.571
Biaya Asuransi Kapal Bahtera 02	-	1.061.659.276
Biaya Docking Bahtera 02	-	1.800.817.701
Biaya Survey Kelayakan Kapal KMP. Bahtera 02	-	256.410.000
Biaya Kebutuhan/Perlengkapan KMP. Bahtera 02	39.921.450	184.027.555
Biaya Jasa Owner Surveyer KMP Bahtera 02	-	81.893.000
Biaya Docking Swakelola KMP. Bahtera 02	-	25.914.171
Biaya Jasa Cleaning Service	16.047.900	176.526.808
Biaya lain-lain cleaning service	-	4.131.800
TOTAL BEBAN KMP BAHTERA NUSANTARA 02	3.330.929.510	10.114.389.272

j) KMP LORRY AMAR

	2024	2023
Pembelian BBM KMP. Lorry Amar	273.459.000	648.800.000
Pembelian Oli KMP. Lorry Amar	15.203.892	30.001.413
Biaya Gaji Personil KMP. Lorry Amar	774.914.272	1.860.788.338
Biaya Umum KMP. Lorry Amar	4.996.200	45.966.852
Biaya Pemeliharaan Kapal KMP. Lorry Amar	4.802.500	272.332.912
Biaya Pengurusan Dokumen Kapal KMP. Lorry Amar	-	35.622.000
Biaya Asuransi Kapal KMP. Lorry Amar	94.903.570	339.035.000
Biaya Docking KMP. Lorry Amar	-	983.008.008
Biaya Survey Kelayakan Kapal KMP. Lorry Amar	187.700.000	132.478.500
Biaya Kebutuhan/Perlengkapan KMP. Lorry Amar	62.611.600	97.856.650
Biaya Jasa Owner Surveyer KMP. Lorry Amar	-	55.100.000
Biaya Docking Swakelola KMP. Lorry Amar	-	-
TOTAL BEBAN KMP LORRY AMAR	1.418.591.034	4.500.989.673

TOTAL BEBAN DIVISI PELAYARAN

	2024	2023
	32.373.978.494	42.557.650.606

4) DIVISI TRANS AMBOINA

	2024	2023
Gaji Pegawai Divisi Trans Amboina	280.792.224	287.637.980
Biaya BBM Bus Trans Amboina	139.317.885	201.108.236
Biaya Oli Bus Trans Amboina	42.560.000	40.725.000
Gaji Sopir dan Kondektur Trans Amboina	447.250.000	528.640.000
Biaya Umum Bus Trans Amboina	13.846.950	10.828.290



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

r. Beban Operasi Langsung (Lanjutan)

4) DIVISI TRANS AMBOINA (Lanjutan)

	2024	2023
Biaya Pemeliharaan Bus Trans Amboina	242.782.000	111.024.000
Biaya Pengurusan Dokumen Bus Trans Amboina	18.465.090	3.137.490
Biaya Asuransi Trans Amboina	-	-
Iuran Wajib Kendaraan Bermotor	-	12.610.000
TOTAL BEBAN DIVISI TRANS AMBOINA	1.185.014.149	1.195.710.996

5) DIVISI TANGKI AIR

	2024	2023
Gaji Sopir dan Kondaktur Tangki Air	94.200.000	-
Biaya BBM Tangki Air	12.760.000	10.750.000
Biaya Oli Mobil Tangki Air	1.500.000	884.000
Biaya Umum Mobil Tangki Air	3.030.000	-
Biaya Pemeliharaan Mobil Tangki Air	775.000	8.639.000
Biaya Pembelian Bahan Baku Mobil Tangki Air	39.545.000	32.130.000
TOTAL BEBAN DIVISI TANGKI	151.810.000	52.403.000

6) DIVISI PENGELOLAAN GEDUNG

	2024	2023
Biaya gaji devisi Aset	-	43.683.140
Biaya Pemeliharaan Fasilitas Gedung	-	19.884.600
Biaya Listrik gedung	113.186.955	116.185.326
Biaya lain-lain pengelolaan aset	10.000.000	15.902.700
TOTAL PENGELOLAAN GEDUNG	123.186.955	195.655.766

s. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

1) Beban Pegawai

	2024	2023
Gaji Direksi	399.600.000	399.600.000
Gaji Divisi Keuangan	548.831.203	497.403.960
Gaji Divisi Personalia/Umum	1.214.076.086	1.144.777.296
Gaji Divisi SPI	295.516.630	279.740.640
Honor Badan Pengawas	159.840.000	159.840.000
Biaya Transport Badan Pengawas	-	12.000.000
Tunjangan Hari Raya	1.133.081.059	1.167.020.434
Tantlem/Bonus	632.968.628	20.791.908
BPJS Kesehatan	637.799.976	470.536.691
BPJS Ketenagakerjaan	1.155.747.448	1.301.128.155
Pakaian Dinas	-	43.830.000
Beban Pelatihan Pegawai/Sosialisasi	34.114.500	25.000.000
Beban Pensiun	161.438.725	87.810.000
Uang Makan	281.517.094	809.850.000
Biaya Representasi Perusahaan	689.310.000	689.310.000
Beban Penyisihan Piutang Karyawan	-	43.850.000
PPh pasal 21 Pegawai	165.935.056	-
TOTAL BEBAN PEGAWAI	7.509.776.405	7.152.489.084



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024

(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

s. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (Lanjutan)

2) Beban Umum Kantor

	2024	2023
Beban Iklan & Ucapan Perayaan Hari Besar	6.500.000	17.145.000
Beban Alat Tulis Kantor	35.807.351	65.098.790
Beban cetak dan Foto copy	33.438.028	44.893.682
Beban Perlengkapan Kantor	-	47.500.000
Beban Pos/Pengiriman	-	2.206.000
Beban Perayaan Kantor	-	6.953.200
Beban Listrik kantor	115.561.132	99.238.783
Beban Telepon kantor	29.873.604	27.413.800
Beban Air	35.934.757	-
Beban PBB Kantor	20.364.510	19.394.772
Beban Langganan Media Massa	6.000.000	1.750.000
Biaya Akomodasi & Jamuan Klien	72.653.160	140.798.920
Biaya Jamuan Kantor	56.953.200	129.230.265
Bantuan Sosial/CSR	120.321.000	117.550.000
Sumbangan Duka/Sakit	27.500.000	31.500.000
Beban Sewa	-	75.000.000
Biaya Retribusi Perijinan SIUP, SITU dan Lain-Lain	444.000	-
Biaya Umum Lainnya	274.904.819	252.923.795
TOTAL BEBAN UMUM KANTOR	836.255.561	1.078.597.007

3) Beban Tatakelola Manajemen

	2024	2023
Biaya Jasa Audit laporan Keuangan	95.000.000	78.000.000
Biaya Penyusunan Anggaran & Lap. Keuangan	2.500.000	-
Biaya Penyusunan SOP, Code Of Conduct, dan CoCG	114.800.000	10.500.000
Biaya Survey dan Penyusunan Bisnis Plan	-	-
Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap	-	41.575.000
Biaya Pemeliharaan Bangunan	223.759.625	201.824.558
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	21.758.627	12.237.692
Biaya Pemeliharaan Mesin dan Peralatan	27.580.000	5.450.000
Biaya Pemeliharaan Inventaris Kantor	37.547.825	36.472.551
Surat-surat Kendaraan	1.072.638.462	622.092.096
Biaya Penyusutan Aktiva	152.600.000	152.300.000
Biaya Perjalanan Dinas Badan Pengawas	423.200.000	506.100.000
Biaya Perjalanan Dinas Direksi	280.350.000	328.050.000
Biaya Perjalanan Dinas Manager	104.000.000	94.200.000
Biaya Perjalanan Dinas Kepala Urusan	266.000.000	258.900.000
Biaya Perjalanan Dinas Staff	101.494.000	43.500.000
Biaya Perjalanan Dinas Klien/Mitra	34.268.100	81.510.000
Biaya Transport Dinas	4.500.000	600.000
Biaya Transport Pengawasan (SPI)	-	-
Biaya Asuransi Gedung	-	-
TOTAL BEBAN TATA KELOLA MANAJEMEN	2.961.996.639	2.473.311.897

4) Beban Hukum

	2024	2023
Biaya Penyelesaian Masalah Hukum Perusahaan	-	2.000.000
Honor Kuasa Hukum	53.775.000	54.500.000
Biaya Penyelesaian Perkara Hukum Lainnya	99.518.000	8.000.000
TOTAL BEBAN MASALAH HUKUM	153.293.000	64.500.000



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)

3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

t. PENDAPATAN/BEBAN LAIN - LAIN

1) Pendapatan lain - lain

	2024	2023
Pendapatan Jasa Giro	2.236.963	8.092.607
Pendapatan Dividen GHL	508.029.225	669.411.600
Pendapatan Lain-lain	199.333	6.060.478
TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN	510.465.521	683.564.685

2) Beban lain - lain

	2024	2023
Biaya Administrasi Bank	2.849.853	94.692.701
PPH Pasal 23	313.766	34.308.266
Kerugian Lain-lain/Penurunan Nilai Investasi	-	7.001.717
Beban PPH Pasal 4 ayat 2 atas sewa gedung	-	-
Beban Bunga Pinjaman	139.474.626	64.399.000
Biaya lain-lain	-	57.043.500
Beban Penurunan Nilai Investasi	-	-
Beban Retribusi	-	-
TOTAL BEBAN LAINNYA	142.638.245	257.445.184

u. Beban Pajak Penghasilan

Beban Pajak Penghasilan
Rekonsiliasi antara Beban Pajak Penghasilan seperti tercantum dalam Laporan Laba/Rugi dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan perusahaan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak

1) Koreksi Fiskal Positif

- Representative
- Sumbangan/Bantuan
- Beban Perayaan Kantor
- Pajak atas Pendapatan Jasa Giro
- Beban Penyisihan Piutang
- Sub Total

	2024	2023
	(1.677.327.310)	(14.483.458.252)
	689.310.000	689.310.000
	27.500.000	31.500.000
	-	6.953.200
	313.766	34.308.266
	-	43.850.000
	(960.203.544)	(13.677.536.786)

2) Koreksi Fiskal Negatif

- Pend. Bunga Jasa Giro
- Sub Total

	2024	2023
	2.236.963	8.092.607
	2.236.963	8.092.607
	(962.440.507)	(13.685.629.393)

Saldo Laba/Rugi kena Pajak
Dibulatkan
Kompensasi Kerugian Fiskal
Pembulatan
Pajak Penghasilan Badan 22%
Pembayaran Uang Muka Pajak
Kekurangan Bayar

	-	-
	-	-
	-	-
	-	-



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



3. INFORMASI YANG MENDUKUNG POS-POS PELAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

v. Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi

Dalam menyusun laporan keuangan, Perseroan menggunakan basis estimasian dan pertimbangan untuk menentukan saldo-saldo dalam laporan keuangan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan tersebut terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Meskipun estimasi dan pertimbangan tersebut disusun berdasarkan pengetahuan terbaik Perseroan atas peristiwa dan kondisi pada saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah estimasi semula.

Berikut penjelasan sifat akun yang menggunakan estimasi dan pertimbangan secara signifikan, sedangkan terkait dengan penyajian jumlah dan saldo dapat dilihat pada catatan yang relevan.

Penyisihan Penurunan Nilai Piutang

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang, Perusahaan mengestimasi penyisihan untuk kerugian penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Perusahaan telah melakukan penelaahan tingkat penyisihan dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Perseroan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan kualitas pinjaman.

Penyusutan

Perusahaan mengakui beban penyusutan aset tetap berdasarkan estimasi umur manfaat berdasarkan suatu metode penyusutan sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. Metode penyusutan diterapkan berdasarkan ekspektasi pola pemanfaatan ekonomi aset pada masa mendatang. Pada setiap akhir tahun, Perseroan mereviu manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan untuk mendapatkan basis estimasi yang paling optimal.

4. PENGUNGKAPAN LAIN

a. Kewajiban Kontijensi

Tidak ada permasalahan hukum perdata yang sedang dihadapi Perusahaan yang terkait dengan kewajiban kontijensi

b. Informasi Umum Perusahaan

1) Pendirian Perusahaan

Perusahaan Daerah Panca Karya (PD Panca Karya) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Ibukota Tingkat I Maluku Nomor 5/DPRD-GR/63 tanggal 6 September 1963 yang telah dicabut dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 4 Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Perusahaan Daerah Panca Karya.

Dan diubah statusnya Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Panca Karya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 2 Tahun 2020 tertanggal 14 Juli 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Panca Karya.

2) Maksud dan Tujuan

Pasal 5 : Perumda dibentuk dengan maksud untuk mempercepat terlaksananya usaha pembangunan daerah dengan mengelola potensi yang ada di Daerah untuk kepentingan pembiayaan, pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6 : Perumda dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tatakelola perusahaan yang baik; dan
- c. Memperoleh laba dan keuntungan sebagai salah satu sumber PAD dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka pembangunan daerah.

Pasal 7 : Kegiatan usaha Perumda meliputi :

- a) Kehutanan;
- b) Perikanan;



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



4. PENGUNGKAPAN LAIN (Lanjutan)

b. Informasi Umum Perusahaan (Lanjutan)

3). Kegiatan Usaha

- c) Pertanian;
- d) Jasa Perbengkelan;
- e) Jasa pertambangan dan Energi;
- f) Pariwisata;
- g) Jasa Umum dan Transportasi; dan
- h) Sub Sektor Perdagangan.

4). Perjanjian-Perjanjian KSO :

- Perusahaan bergerak dalam bidang usaha kehutanan (HPH) berdasarkan Surat B345 Keputusan kementraian Pertanian C.q Direktorat Jenderal Kehutanan Nomor; 113/Kpts/II/1978 tertanggal 22 Februari 1978 untuk Jangka waktu 20 tahun. Dan Mengalai pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam berdasarkan surat keputusan Kementerian Kehutanan Nomor; 117/Kpts-II/2000 tentang Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam PD Panca Karya Seluas 63.440 Hektar yang terletak dikelompok Hutan Wai Tena, Wei Tawa dan Teluk Bara Pulau Buru Selatan Provinsi Maluku. dan dilakukan Pembaharuan Berdasarkan Keputusan Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 /1/IUPHHK-HA/PMDH/2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Kepada PD. Panca Karya Atas Areal Hutan Produksi Seluas 59.515 Hektar Di kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Buru, Provinsi Maluku tanggal 12 September 2017.
- Bidang Usaha Kapal Motor Penyebrangan (KMP) merupakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku meliputi :
 - 1) Kapal Motor Penyebrangan (KMP) **Teluk Ambon** dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dengan masing-masing Nomor : 500.11.12-472 Tahun 2023 dan Nomor : 13/PK-DR/KSO/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 dengan jangka waktu KSO selama 1 (satu) Tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 2) Kapal Motor Penyebrangan (KMP) **Tanjung Koako** dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dengan masing-masing Nomor : 500.11.12-466 Tahun 2023 dan Nomor : 07/PK-DR/KSO/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 dengan jangka waktu KSO selama 1 (satu) Tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 3) Kapal Motor Penyebrangan (KMP) **Bada Leon** dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dengan masing-masing Nomor : 500.11.12-465 Tahun 2023 dan Nomor : 06/PK-DR/KSO/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 dengan jangka waktu KSO selama 1 (satu) Tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 4) Kapal Motor Penyebrangan (KMP) **Tatihu** dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dengan masing-masing Nomor : 500.11.12-471 Tahun 2023 dan Nomor : 12/PK-DR/KSO/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 dengan jangka waktu KSO selama 1 (satu) Tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 5) Kapal Motor Penyebrangan (KMP) **Lelemuku** dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dengan masing-masing Nomor : 552-89 Tahun 2019 dan Nomor : 198/PK-DR/KSO/XII/2019 tertanggal 27 Desember 2019 dengan jangka waktu KSO selama 1 (satu) Tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
 - 6) Kapal Motor Penyebrangan (KMP) **Maluku Indah 01** dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dengan masing-masing Nomor : 500.11.13-110 Tahun 2024 dan Nomor : 03/PK-DR/KSO/V/2024 tertanggal 24 Juli 2024 dengan jangka waktu KSO selama 1 (satu) Tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



4. PENGUNGKAPAN LAIN (Lanjutan)

b. Informasi Umum Perusahaan (Lanjutan)

4). Perjanjian-Perjanjian KSO (Lanjutan) :

- 7) Kapal Motor Penyebrangan (KMP) **Tanjung Sole** dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dengan masing-masing Nomor : 500.11.12-470 Tahun 2023 dan Nomor : 11/PK-DR/KSO/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 dengan jangka waktu KSO selama 1 (satu) Tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- 8) Kapal Motor Penyebrangan (KMP) **Sardinela** dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dengan masing-masing Nomor : 500.11.12-467 Tahun 2023 dan Nomor : 08/PK-DR/KSO/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 dengan jangka waktu KSO selama 1 (satu) Tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- 9) Kapal Motor Penyebrangan (KMP) **Bahtera Nusantara 02** dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dengan masing-masing Nomor : 500.11.12-468 Tahun 2023 dan Nomor : 09/PK-DR/KSO/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 dengan jangka waktu KSO selama 1 (satu) Tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- 10) Kapal Motor Penyebrangan (KMP) **Lorry Amar** dengan Surat Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dengan masing-masing Nomor : 500.11.12-469 Tahun 2023 dan Nomor : 10/PK-DR/KSO/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 dengan jangka waktu KSO selama 1 (satu) Tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Pengoperasian Bus Rapid Transport Trans Amboina merupakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan Perjanjian Kerjasama dengan masing-masing nomor : 500.11.10-05 Tahun 2024 dan Nomor : 01/PK-DR/KSO/I/2024 dengan jangka waktu kerjasama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- Pengelolaan Gedung merupakan perjanjian kerjasama operasional dengan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dengan perjanjian kerjasama masing-masing Nomor 539-10 Tahun 2020 dan Nomor : 01/PK-DR/KSO/II/2020 dengan jangka perjanjian 5 (lima) tahun terhitung 03 Februari 2020 sampai dengan 31 Januari 2025.

5) Status dan Tempat Kedudukan

- (1) Perumda Panca Karya merupakan Perusahaan Induk (*Holding Company*) dan membentuk anak Perusahaan atau mendirikan perusahaan patungan dengan persetujuan Gubernur.
- (2). Perumda Panca Karya berkedudukan di Provinsi Maluku dan berkantor di Pusat Kota Ambon sebagai Ibukota Provinsi Maluku.

6) Organisasi dan Personalia

Dewan Pengawas

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 602 Tahun 2022 tertanggal 11 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Panca Karya :

	2024	2023
- Dewan Pengawas	Muhamad Arief Hentihu	Muhamad Arief Hentihu

Pengelola

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 672 Tahun 2022 tertanggal 26 September 2022 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Panca Karya:

	2024	2023
- Direktur Utama	Rusdi Ambon, SE. M.Si.	Rusdi Ambon, SE. M.Si.

Jumlah pegawai Perumda Panca Karya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sejumlah 244 dan 259 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2024	2023
1	Pegawai Perusahaan	79 Orang	79 Orang
2	Pegawai Kontrak	165 Orang	180 Orang
Total		244 Orang	259 Orang



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Disajikan Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Disajikan Lain)



4. PENGUNGKAPAN LAIN (Lanjutan)

c. Tanggal Penyelesaian Laporan Keuangan

Direksi bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, yang disusun dan diotorisasi pada tanggal 10 Maret 2025.



No : 00016/2.1255/AU.2/01/1621-2/1/IV/2025

Laporan Auditor Independen

**Kepada Yth.
Direktur Utama
Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Panca Karya
Ambon, Maluku**

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Panca Karya terlampir, yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2024, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Umum Daerah Panca Karya tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraph Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perumda Panca Karya berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Panca Karya tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit dengan laporan auditor independen nomor: 00019/2.1255/AU.2/01/1621-1/1/IV/2024 yang menyatakan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 29 April 2024.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.

Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami.

Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

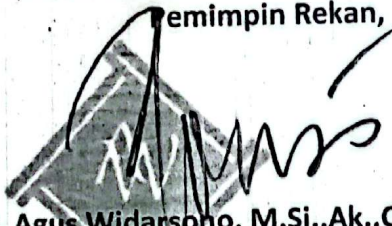
Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Kantor Akuntan Publik

Dr. Agus Widarsono, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA.

Revisi
Kepemimpin Rekan,


Dr. Agus Widarsono, M.Si.,Ak.,CA.,CPA,CIISA.

No. Izin AP : 1621

No. Izin UKAP : 69/KM.1/2019

Bandung, 22 April 2025





PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
ANALISIS RASIO KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dengan Perbandingan Tahun 2023)

Lampiran (1-1)



	2024	2023
I LIQUIDITY		
a. Current Ratio		
Ratio ini digunakan utk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.		
$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	$\frac{2.045.087.999}{17.879.297.952}$	$\frac{2.688.396.260}{17.819.910.994}$
Current Ratio	11,44 %	15,09 %
b. Acid Test Ratio		
Ratio ini digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.		
$\frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	$\frac{75.711.734}{17.879.297.952}$	$\frac{145.984.326}{17.819.910.994}$
Acid Test Ratio	0,42 %	0,82 %
c. Working Capital to Total Assets Ratio		
Ratio ini digunakan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dan posisi modal kerja.		
$\frac{\text{Aset Lancar} - \text{Kewj. Lancar}}{\text{Jumlah Aset}} \times 100\%$	$\frac{(15.834.209.953)}{48.159.629.520}$	$\frac{(15.131.514.734)}{50.144.601.243}$
Working Capital To Total Assets Ratio	(33) %	(30,18) %
II LEVERAGE		
a. Total Debt to Equity Ratio		
Ratio ini digunakan untuk mengukur berapa rupiah dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan keseluruhan kewajiban.		
$\frac{\text{Total kewajiban}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$	$\frac{20.456.998.964}{27.702.630.556}$	$\frac{20.764.643.378}{29.379.957.865}$
Total Debt to Equity Ratio	73,84 %	70,68 %
b. Long term debt to equity ratio		
Ratio ini digunakan untuk mengukur berapa rupiah dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan kewajiban jangka panjang		
$\frac{\text{Kewajiban Jangka Panjang}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\%$	$\frac{2.577.701.011}{27.702.630.556}$	$\frac{2.944.732.383}{29.379.957.865}$
Long term debt to equity ratio	9,30 %	10,02 %



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
ANALISIS RASIO KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dengan Perbandingan Tahun 2023)

Lampiran (1-2)



III ACTIVITY

Ratio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan dana dalam perusahaan.

a. Total assets turn over

		2024	2023
$\frac{\text{Pendapatan netto}}{\text{Jumlah aset}}$	x 1 Kali	$\frac{44.210.040.175}{48.159.629.520}$	$\frac{41.115.378.782}{50.144.601.243}$
Total assets turn over		92 %	82 %

b. Working capital turn over

$\frac{\text{Pendapatan netto}}{\text{Ast. Lancar - Kewj. Lancar}}$	x 1 Kali	$\frac{44.210.040.175}{(15.834.209.953)}$	$\frac{41.115.378.782}{(15.131.514.734)}$
Working capital turn over		(279) %	(272) %

IV PROFITABILITY

Ratio ini digunakan untuk mengukur besarnya laba yang diperoleh dari hasil operasi.

a. Gross profit margin

Ratio ini digunakan untuk mengetahui setiap rupiah pendapatan menghasilkan laba bruto.

$\frac{\text{Laba kotor}}{\text{Pendapatan}}$	x100%	$\frac{9.436.167.019}{44.210.040.175}$	$\frac{(4.140.679.765)}{41.115.378.782}$
Gross profit margin		21 %	(10) %

b. Operating income ratio

Ratio ini digunakan untuk mengetahui setiap rupiah pendapatan menghasilkan laba operasi.

$\frac{\text{Laba (rugi) operasi}}{\text{Pendapatan}}$	x100%	$\frac{(1.677.327.310)}{44.210.040.175}$	$\frac{(14.909.577.753)}{41.115.378.782}$
Operating income ratio		(4) %	(36) %

c. Operating ratio

Ratio ini digunakan untuk mengetahui biaya operasi per rupiah penjualan.

$\frac{\text{HPP + Biaya operasi}}{\text{Penjualan}}$	x100%	$\frac{34.773.873.156}{44.210.040.175}$	$\frac{45.256.058.547}{41.115.378.782}$
Operating ratio		79 %	110 %



PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA) PANCA KARYA
ANALISIS RASIO KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2024
(Dengan Perbandingan Tahun 2023)

Lampiran (1-3)



2024

2023

IV PROFITABILITY (Lanjutan)

Ratio ini digunakan untuk mengukur besarnya laba yang diperoleh dari hasil operasi.

d. Net profit margin

Ratio ini digunakan untuk mengetahui keuntungan netto per rupiah pendapatan.

$\frac{\text{Laba Tahun Berjalan}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$	$\frac{(1.677.327.310)}{44.210.040.175}$	$\frac{(14.483.458.252)}{41.115.378.782}$
Net profit margin	(4) %	(35) %